

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam pengertian yang sederhana, pembangunan merujuk pada usaha atau rangkaian tindakan untuk mencapai perubahan yang positif. Proses pembangunan ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada upaya untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik daripada sebelumnya atau meningkatkan kualitasnya, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat ditingkatkan. Dalam konteks ekonomi pembangunan, fokus utamanya adalah pada penciptaan, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan nasional. (Todaro, 2006)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data dasar yang memberikan informasi tentang aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Secara sederhana, PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah tersebut selama periode tertentu. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara melibatkan akumulasi modal, yang mencakup investasi baru seperti tanah dan sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan angkatan kerja, serta perkembangan teknologi yang berlangsung. (Todaro, 1994)

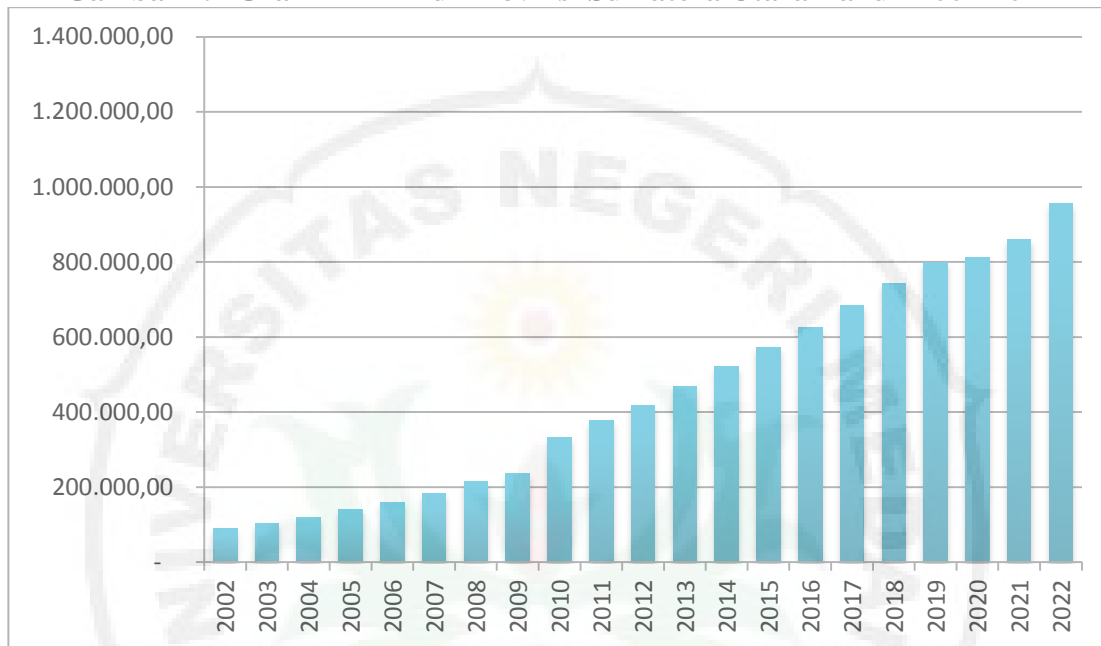
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah atau daerah. Penghitungan PDRB melibatkan dua jenis harga, yaitu harga berlaku dan harga

konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mengukur nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu, sementara PDRB atas dasar harga konstan mengukur nilai tambah dengan menggunakan harga yang tetap pada tahun tertentu sebagai dasar. (Andre, 2023)

Data PDRB yang secara berkala disajikan sangat bermanfaat dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah dan berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, baik secara keseluruhan maupun dalam sektor-sektor ekonomi yang berbeda. Dengan data ini, kita dapat melakukan analisis terhadap struktur ekonomi suatu daerah dengan melihat distribusi nilai tambah dari PDRB atas dasar harga berlaku pada berbagai sektor ekonomi dalam perbandingan dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu, yang berguna untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. (Jayanti, 2019)

Dalam penghitungan PDRB, digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku, PDRB harga berlaku adalah pendekatan dalam menghitung PDRB yang memperhitungkan nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun tertentu. Dalam metode ini, perhitungan nilai tambah sektor ekonomi melibatkan harga pasar saat itu, termasuk juga pajak tak langsung neto, dan tidak mengurangi penyusutan. Pendekatan ini sering digunakan sebagai cara umum untuk menilai PDRB suatu wilayah atau negara.

Gambar 1.1 Grafik PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Pada gambar 1.1, data Produk Domestik Regional Bruto setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 955.193,09 miliar rupiah. Dan diantara dari tahun 2002-2022 nilai terendah ditahun 2002 dengan nilai 89.670,15 miliar rupiah.

PDRB adalah nilai total tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau daerah selama periode waktu tertentu, atau dapat dianggap sebagai jumlah total nilai akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi dalam wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan tambahan nilai yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengukur tambahan nilai dengan menggunakan harga tetap pada titik waktu tertentu sebagai harga referensinya.

(Widodo, 2006). PDRB mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh barang dan jasa dalam suatu daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDRB merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu daerah atau provinsi dalam periode tertentu. Nilai PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki potensi pariwisata yang besar, menjadi daya tarik bagi investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal mereka di sana. (Pujoalwanto, 2004)

Dalam Laporan Akhir Penyusunan Analisa Produk Domestik Regional Bruto (2017) Permasalahan utama dalam pembangunan daerah terletak pada pengambilan kebijakan yang tepat dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Penetapan kebijakan harus didasarkan pada karakteristik unik dari daerah yang bersangkutan, serta memanfaatkan potensi sumber daya manusia, lembaga, dan sumber daya fisik secara lokal di wilayah tersebut. Ketidakakuratan dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan dapat mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan ekonomi daerah, dan energi serta sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mengimplementasikan pemanfaatan potensi daerah seringkali tidak dioptimalkan dalam menentukan kebijakan prioritas yang kurang efisien. Dan permasalahan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diantaranya disebabkan tingginya ketimpangan pendapatan antarwilayah yang disebabkan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik yang menyebabkan adanya permasalahan pembangunan ekonomi, yakni ketidakmampuan

dalam mengendalikan SDM dan SDA. Keunggulan modal SDM atau IPM dan aktivitas ekonomi yang tinggi pada suatu daerah akan memungkinkan munculnya masalah pembangunan yang tidak merata. Provinsi Sumatera Utara memiliki permasalahan yang didasari oleh permasalahan PDRB perkapita yang berbeda-beda yang menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Tingginya tingkat penanaman modal, baik dari investasi lokal maupun investasi asing, di suatu negara adalah sebuah indikator bahwa ekonomi negara tersebut berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang mencukupi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi para investor untuk mengalokasikan modal mereka, dan dampaknya positif tidak hanya bagi negara itu sendiri tetapi juga bagi berbagai daerah di dalamnya. Contohnya, peningkatan peluang kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta percepatan dalam pembangunan di tingkat pusat dan daerah. (Pujoalwanto, 2004)

Tidak hanya itu, investasi dan penanaman modal juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan nasional dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, hal ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Sukirno, 2005)

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Analisis Harrod-

Domar menunjukkan bahwa jika pada suatu tahun pemanfaatan kapasitas produksi penuh untuk barang modal, oleh karena itu, pengeluaran agregat (AE) di tahun tersebut ($AE = C + I$) akan mengakibatkan peningkatan kapasitas barang modal di tahun mendatang. Ini berarti investasi dalam satu tahun akan meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa di tahun berikutnya. (Arsyad, 2016)

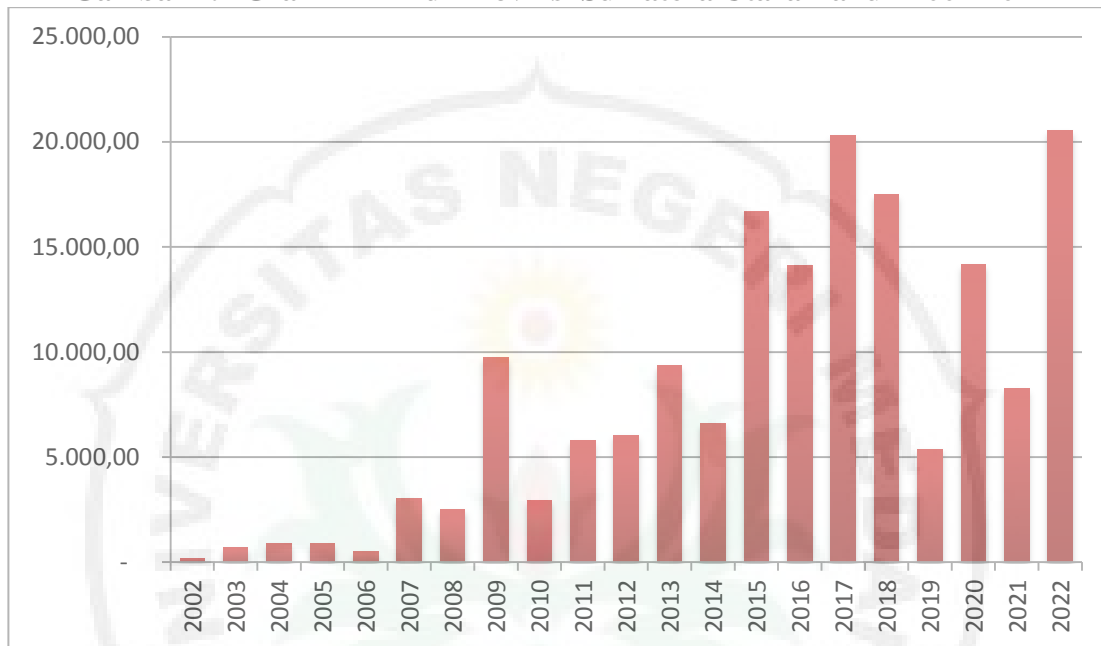
Teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa investasi dalam satu tahun akan menghasilkan peningkatan jumlah barang modal di tahun berikutnya ($K_1 = K_0 + I$), asalkan pengeluaran agregat pada tahun tersebut mencapai $AE = C + I + \Delta I$ untuk memastikan penggunaan penuh kapasitas produksi. Dengan pengeluaran agregat ini, pendapatan nasional menjadi Y_{k1} , yang setara dengan kapasitas produksi K_1 untuk menghasilkan pendapatan nasional, mencapai pemanfaatan penuh kapasitas produksi. (Arsyad, 2016)

Analisis ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi dengan dua sektor, pertumbuhan ekonomi jangka panjang memerlukan peningkatan investasi. Namun, dalam ekonomi dengan tiga atau empat sektor, teori Harrod-Domar tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi pemanfaatan penuh kapasitas produksi. Dalam teori ini juga ditekankan bahwa jika pengeluaran agregat mencakup lebih banyak komponen, seperti ekspor dan pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pemanfaatan barang modal akan optimal jika $AE = C + I + G + (X-M)$, di mana $I + G + (X-M)$ setara dengan $(I+\Delta I)$. Teori Harrod-Domar juga menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai dengan terus meningkatnya nilai dari $I + G + (X-M)$. (Arsyad, 2016)

Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA), PMA merujuk kepada investasi modal asing yang dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan digunakan untuk mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Dalam konteks ini, investor modal asing bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang terkait dengan investasi modal tersebut. Modal asing ini pada dasarnya adalah bentuk pembayaran yang berasal dari luar negeri dan tidak dianggap sebagai bagian dari cadangan devisa Indonesia. Dengan izin dari pemerintah, modal tersebut digunakan untuk mendukung operasi perusahaan di Indonesia. Konsep PMA juga mencakup aset yang dimiliki oleh entitas asing yang digunakan dalam operasi perusahaan, termasuk teknologi baru yang dimiliki oleh investor asing dan barang-barang yang diimpor dari luar negeri ke wilayah Indonesia, asalkan sumber pembiayaannya bukan berasal dari kekayaan Indonesia. Sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan diizinkan oleh undang-undang dapat dialihkan, tetapi harus digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis di Indonesia.

Konsumsi masyarakat yang cenderung menginginkan produk-produk luar yang memiliki daya saing dan kompetitivitas tinggi dapat meningkatkan produksi dan laba, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan investasi (PMA) dan juga dapat meningkatkan (PDRB) melalui keuntungan yang diperoleh dari PMA tersebut.

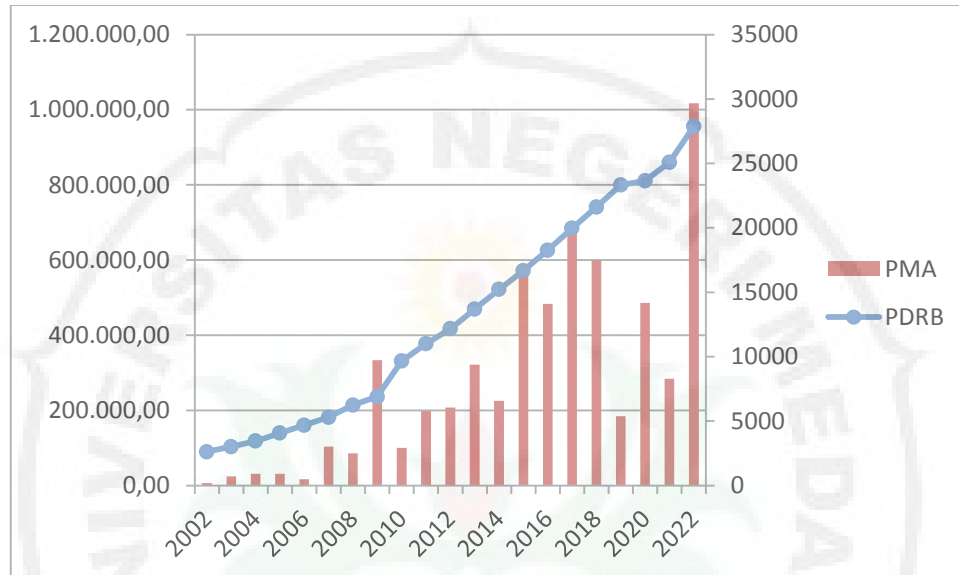
Gambar 1.2 Grafik PMA di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Pada gambar 1.2, data Penanaman Modal Asing dari tahun 2002-2022 memiliki nilai tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan 29.675,40 disusul tahun 2017 dengan nilai tertinggi yaitu 20.297,46 miliar rupiah, lalu mengalami fluktuasi penurunan tahun 2018 ke 2019 dari 17.488,39 ke- 5.384,68 miliar rupiah, dikarenakan terjadinya kebijakan *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan ini sebenarnya terobosan baru dan niatnya baik. Namun, eksekusinya tidak berjalan dengan baik, karena banyak kementerian dan lembaga yang belum terhubung, sehingga justru menjadi hambatan dalam penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya. Setelah hal tersebut dapat teratasi maka pada tahun 2020 PMA meningkat, tetapi tahun 2021 terjadi penurunan kembali, hal tersebut karena terjadinya COVID-19 (*Corona Virus Disease*).

Gambar 1.3 Grafik PMA dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Dari gambar 1.3 terdapat kesenjangan data/gap data yang ada pada gambar 1.1 yaitu ketidaksesuaian antara PMA dengan PDRB, karena dengan meningkatnya PMA meningkat pula PDRB, begitu pula sebaliknya, jika PMA turun maka turun pula tingkat PDRBnya, akan tetapi pada data yang berfluktuasi naik turun seperti salah satunya data pada tahun 2018 ke 2019 yang menurun drastis tidak menurunkan tingkat PDRB pada tahun yang sama. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada.

Menurut teori *Solow-Swan*, terdapat tiga faktor atau komponen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga faktor ini mencakup akumulasi modal, tingkat jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Investasi dalam akumulasi modal, yang mencakup segala bentuk investasi baru yang disalurkan ke dalam aset seperti tanah, peralatan fisik, dan peningkatan sumber daya manusia.

Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang dapat berkontribusi pada produksi ekonomi. Kemajuan teknologi atau peningkatan dalam tingkat keahlian dan pengetahuan, yang meningkatkan produktivitas perkapita melalui penggunaan teknologi yang lebih canggih atau peningkatan keterampilan individu. Dalam model ini PDB nasional meningkat karena permintaan otonomi meningkat. Dengan modal yang lebih banyak, maka ekonomi akan menghasilkan PDB yang lebih tinggi. (Todaro, 2003)

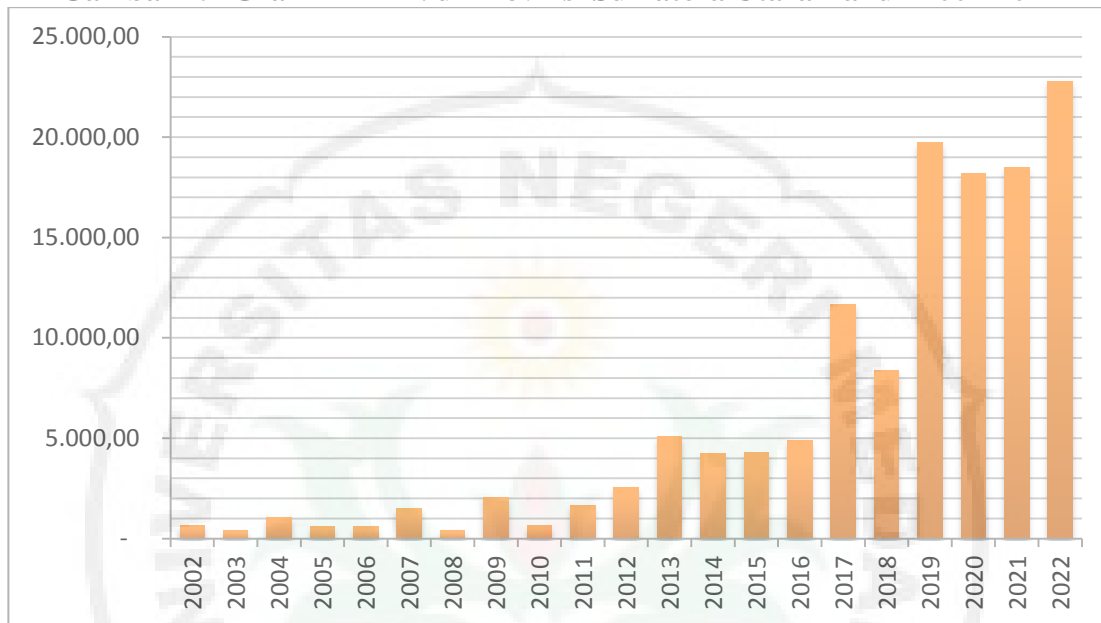
Menurut UU No 6 th 1968 dan UU No 12 th 1970 yang berkaitan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), definisi PMDN telah dijelaskan secara rinci. Menurut pasal 1, "modal dalam negeri" mengacu pada bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk harta benda dan hak-hak, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun entitas swasta asing yang beroperasi di Indonesia. Modal ini digunakan agar dapat mendukung berbagai usaha, asalkan tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk penanaman modal asing menurut Pasal 2 Undang-Undang No 12 tahun 1970. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri ini dapat berupa individu atau badan hukum yang sah di Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam memengaruhi pendapatan dan produksi. Semakin besar PMDN, pemerintah akan dapat meningkatkan penyediaan barang publik, yang juga dapat mendorong pertumbuhan rumah tangga dan sektor swasta dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Ini pada akhirnya akan mengakibatkan

peningkatan PDRB. (Simanjuntak, 1982). Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2019) Salah satu faktor penentu tercapainya realisasi investasi adalah terlaksananya kegiatan promosi investasi yang efektif, terarah dan inovatif, ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, dilaksanakan secara spesifik ditujukan kepada segmen/sasaran yang jelas baik di dalam maupun luar negeri. Faktor penentu lain yang mendukung tercapainya realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara adalah kerjasama yang baik dengan perusahaan maupun perangkat daerah yang melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota melalui kegiatan monitoring/pengawasan baik dalam rangka penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, maupun kualitas aspek pelayanan perizinan. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebaran investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terlihat tidak merata, bahkan di beberapa kabupaten/kota sama sekali tidak mengalami investasi baik PMDN maupun PMA. Hal ini karena selain belum memiliki peta potensi daerah, tidak semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki lokasi atau potensi yang menarik bagi investor.

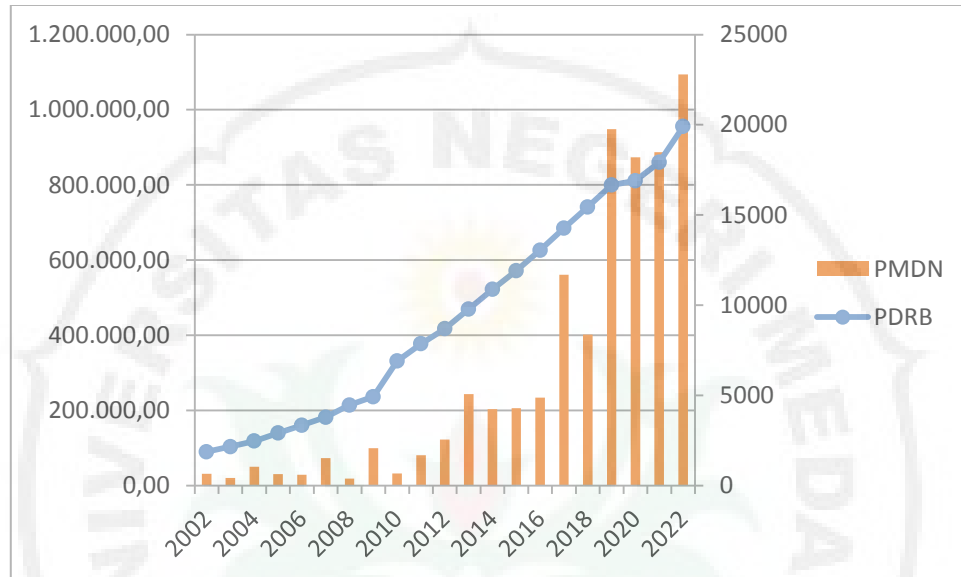
Gambar 1.4 Grafik PMDN di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Pada gambar 1.4, terjadi fluktuasi naik turun data yang dimana data Penanaman Modal Dalam Negeri yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 22.789,20 miliar rupiah, selanjutnya diantara tahun 2002-2022 data Penanaman Modal Dalam Negeri terendah yaitu pada tahun 2008 dengan nilai 382,70. Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2017 dengan nilai 11.683,60 miliar rupiah, jauh meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya, akan tetapi menurun kembali pada tahun 2018 dengan nilai 8.371,80 miliar rupiah.

Gambar 1.5 Grafik PMDN dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Dari gambar 1.5 juga terjadi kesenjangan data/gap data yang ada pada gambar 1.1 yaitu ketidaksesuaian antara PMDN dengan PDRB, karena dengan meningkatnya PMDN seharusnya dapat meningkatkan PDRB, begitu pula sebaliknya, jika PMDN turun maka turun pula tingkat PDRBnya, akan tetapi pada data yang berfluktuasi naik turun seperti salah satunya data pada tahun 2017 ke 2018 yang menurun tidak menurunkan tingkat PDRB pada tahun yang sama. Maka dari itu terjadi ketidaksesuaian antara data dengan teori yang ada.

Dimana menurut pendapat Mankiw (2003) Investasi merupakan langkah awal dalam proses pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh sektor swasta, pemerintah, atau dalam bentuk kerjasama antara keduanya. Investasi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Penelitian yang dilakukan Hanani dan Syahlina tahun 2020 menyoroti bahwa PMDN mempengaruhi PDRB, sehingga ketika PMDN tinggi maka semakin tinggi pula PDRB. Penelitian Momongan (2013) menyimpulkan bahwa PMDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan PDRB.

Menurut Todaro (2006), untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya dalam hal menabung dan berinvestasi dalam sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi yang signifikan dari sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik. Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai "modal manusia" atau *human capital*, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara umum, serta berpotensi meningkatkan pendapatan mereka secara tidak langsung. Keuntungan finansial dari investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus dievaluasi dengan membandingkannya dengan total biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan sebagai bentuk investasi.

Pada tahun 1999, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) sebagai alat pengukuran kualitas modal manusia. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan output di masa depan, yang gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi

dalam pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, karena individu yang sehat cenderung lebih produktif daripada yang tidak sehat, dan individu yang memiliki keterampilan khusus cenderung lebih produktif daripada yang tidak memiliki keterampilan (Case, 2006).

Mutu dari modal manusia adalah suatu aset yang dapat dibangun dan dikembangkan. Pengorbanan yang dilakukan untuk mengembangkan modal manusia baru akan memberikan hasil di masa depan, sehingga istilah "modal" digunakan. Meskipun tidak dapat diukur secara langsung, mutu modal manusia dapat dikenali melalui efektivitasnya. Mutu modal manusia memiliki perbedaan dengan produktivitas, tetapi peningkatan mutu modal manusia dapat meningkatkan produktivitas. Peningkatan mutu modal manusia akan meningkatkan hasil produksi masyarakat, dan peningkatan modal fisik akan lebih efektif jika mutu modal manusia juga baik. Oleh karena itu, peningkatan mutu modal manusia akan berdampak positif pada output (Subri, 2008).

Untuk mendorong perkembangan ekonomi suatu daerah melalui peningkatan PDRB, diperlukan upaya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengelola faktor produksi dengan efisien.

Gambar 1.6 Grafik IPM di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022

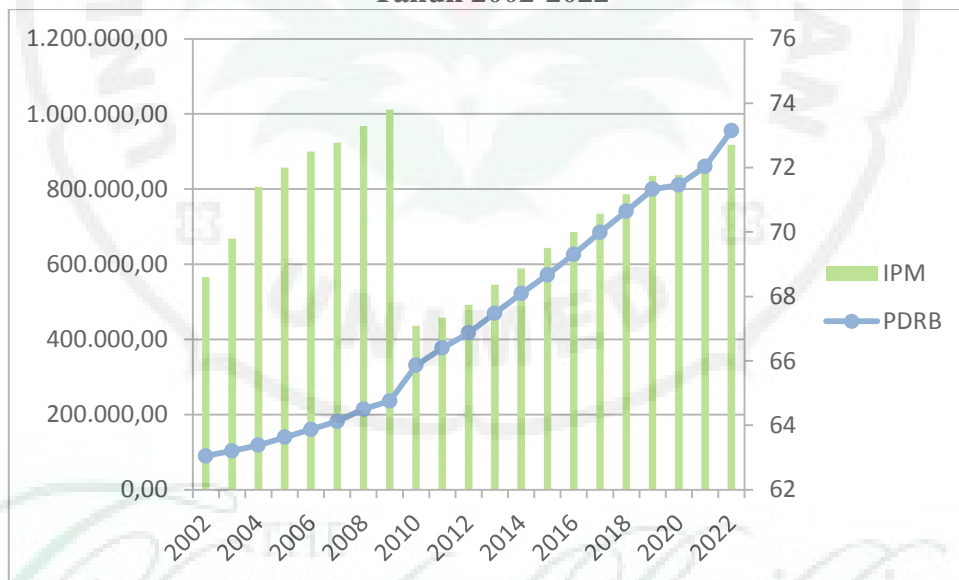


Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Gambar 1.4, Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2009 memiliki nilai tertinggi dengan 73,80%, meskipun mengalami fluktuasi penurunan ditahun setelahnya yaitu 2010 dengan 67,09%, tetapi ditahun berikutnya hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang baik. Hal ini terjadi pada tahun 2009 ke 2010 yang mengalami penurunan drastis, disebabkan karena terjadi perubahan metode baru dimana metode model agregasi diubah dari model rata-rata aritmatik menjadi model rata-rata geometrik. Data IPM dengan metode lama yaitu penghitungan deret aritmatik dan indikator penyusun dengan angka melek huruf dan PDB perkapita. Metode tersebut dianggap tidak relevan sehingga UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dan sudah digunakan oleh BPS.

Dengan adanya metode baru perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level/peringkat IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah. Dengan terjadinya penurunan level IPM dimana metode baru lebih rendah dibanding dengan metode lama, maka akan menurunkan juga peringkat IPM, peringkat IPM tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

Gambar 1.7 Grafik IPM dan PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2022



Sumber: BPS Provinsi SUMUT (data telah diolah, 2023)

Pada gambar 1.7 terjadi kesenjangan data/gap data yang ada pada gambar 1.1 yaitu ketidaksesuaian antara IPM dengan PDRB, seperti pada tahun 2009 ke 2010 yang menurun drastis tidak menurunkan PDRB akan tetapi meningkatkan PDRB. Oleh sebab itu terjadi ketidaksesuaian antara data dengan teori yang ada.

Todaro (2000) berpendapat jika pembangunan wilayah itu bertujuan untuk membangun manusia. Kapasitas suatu negara merupakan hal yang penting untuk dibangun, dalam membangun kapasitas suatu negara dibutuhkan masyarakat yang bisa mengasimilasi teknologi modern demi mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

PDRB adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan pembangunan yang sukses atau berkualitas tinggi dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi ini memiliki korelasi yang kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia, karena kemampuan beli adalah salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tara May Sabilla dan Hadi Sumarsono (2022). IPM memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap PDRB. PMDN memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap PDRB. Dalam judul "Pengaruh Belanja Pemerintah, PAD, PMDN, IPM terhadap PDRB.

Sementara itu, penelitian oleh Meilina pada tahun (2018) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam pada tahun 2000-2017," menemukan hasil pada jangka pendek dan jangka panjang, PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB. IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak Eviews untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA),

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah *non-stasioneritas* dalam variabel adalah dengan menggunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model* atau ECM). Asalkan terdapat kointegrasi dalam sekelompok variabel yang bersifat *non-stasioner*, maka pemodelan koreksi kesalahan dapat digunakan secara valid.

Penelitian ini memanfaatkan model *Error Correction Model* (ECM) yang telah melalui serangkaian uji statistik seperti uji derajat integrasi, uji *Engle-Granger* (EG), serta uji kointegrasi. Hasil-hasil uji tersebut menunjukkan model ECM dapat digunakan dan layak untuk menganalisis hubungan antar variabel-variabel penelitian dalam jangka pendek dan jangka panjang, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan dan ketidaknormalan dalam data serta karakteristik ketidastasioneran.

Error Correction Model (ECM) adalah model yang digunakan untuk menyesuaikan persamaan regresi antara variabel-variabel yang pada dasarnya bersifat *non-stasioner* secara individual sehingga dapat kembali kepada nilai keseimbangannya dalam jangka panjang. Pendekatan ini membantu dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dalam kedua jangka waktu tersebut, terutama ketika ada ketidakseimbangan dan ketidaknormalan dalam model serta ketidastasioneran dalam data. Penggunaan model ECM dalam penelitian ini penting karena adanya kekhawatiran akan ketidaksesuaian antara jangka pendek dan jangka panjang dalam hubungan antara PMA, PMDN, IPM, dan PDRB. Melalui

model ECM, penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengaruh PMA, PMDN, dan IPM terhadap PDRB.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu dan dengan latar belakang suatu masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh PMA, PMDN dan IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat investasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Utara belum mencapai potensinya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.
2. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara belum optimal dalam memberikan kontribusi yang memadai terhadap peningkatan tingkat PDRB.
4. Meskipun terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto setiap tahunnya, peningkatan ini tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2002-2022.
2. Objek penelitian yaitu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2002-2022.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PMA terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh PMA, PMDN dan IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.

3. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui pengaruh PMA, PMDN dan IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai faktor penting dalam mengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah agar investasi PMA dan PMDN terdongkrak, tingkat IPM meningkat, dan PDRB meningkat dengan signifikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai informasi data empiris dan untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang PMA, PMDN, dan IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam mengembangkan, menerapkan dan melatih berpikir ilmiah sehingga mampu memperluas wawasan khususnya mengenai Pengaruh PMA, PMDN, dan IPM terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.